

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ika Fitria¹, Afrilia Cahyani², Muhammad Yasmin³, Supriadi Jufri⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email Korespondensi: ikafitria43162001.1b@gmail.com

Email: ikafitria@hkb.umsrappang.ac.id; afriliacahyani@hkb.umsrappang.ac.id, muhammadyasmin@hkb.umsrappang.ac.id; supriadijufri@hkb.umsrappang.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is implementing a Covid-19 vaccination policy as part of the government's efforts reduce the spread of the covid-19 virus which started in 2019. Goal this research is to determine the implementation of the Covid-19 vaccination policy in the Province South Sulawesi. This research uses a qualitative descriptive research design with data collection techniques obtained through observation, interviews and activities documentation. This research data analysis technique is interactive starting from reduction data, presenting data and drawing conclusions using triangulation data as a technique for checking the validity of findings. The results of this research show that the implementation of the Covid-19 vaccination policy in South Sulawesi Province, with Using Edward III's theory of policy implementation shows that communication in terms of consistency has not been effective, resources in terms of resources equipment and budget are not yet optimal. Meanwhile, bureaucratic structure and disposition it's been going well.

Keywords: Vaccination, Policy Implementation, Covid-19.

ABSTRAK

Indonesia menerapkan kebijakan vaksinasi covid-19 sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus covid-19 yang bermula pada tahun 2019. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini secara interaktif mulai dari reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan dengan memanfaatkan triangulasi data sebagai teknik pengecekan keabsahan temuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Provinsi Sulawesi selatan, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III menunjukkan bahwa komunikasi dari segi konsistensi belum efektif, sumberdaya dari aspek sumberdaya peralatan dan anggaran belum optimal. Sedangkan struktur birokrasi dan disposisi sudah berjalan dengan baik.

Kata kunci: Vaksinasi, Implementasi Kebijakan, Covid-19.

PENDAHULUAN

Pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) telah menginfeksi lebih dari 170 juta manusia, menyebabkan lebih dari 3,7 juta kematian, dan memiliki dampak negatif yang parah pada ekonomi global. Pengembangan, alokasi, dan penyebaran vaksin yang aman dan efektif secara cepat adalah instrumen utama untuk menyelamatkan nyawa dan mengatasi pandemi (Duan et al., 2021). dalam masyarakat, seperti meningkatnya pengangguran, rendahnya kualitas SDM, dan lainnya. Vaksin sekarang menjadi alat baru yang memiliki peran penting dalam memerangi Covid-19 di era pandemi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksi@governance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

saat ini, melihat begitu banyak vaksin yang berhasil dan mulai dikembangkan merupakan sesuatu sangat menggembirakan (Akbar et al., 2021). Vaksinasi menjadi harapan utama untuk membendung pandemi Covid-19 yang saat ini sedang melanda dunia (Piraveenan et al., 2021). Vaksinasi terhadap SARS-CoV-2 telah menjadi langkah paling signifikan dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19 (Huang & Feng, 2021).

Indonesia telah menjadikan implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 sebagai bagian dari strategi mengatasi pandemi Covid-19. Praktik vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk melindungi penduduk dari penyakit dan kematian akibat Covid-19. Setelah vaksinasi, dibutuhkan waktu agar kekebalan dapat terbentuk. Kekebalan optimal terbentuk hanya ketika seseorang telah mendapatkan vaksinasi dosis penuh sesuai dengan jadwal yang dianjurkan. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan kekebalan kelompok berkembang dengan baik, maka penularan infeksi dapat berkurang, namun jika cakupan vaksinasi masih rendah maka kemungkinan infeksi atau penularan Covid-19 juga masih tinggi.

Banyak orang yang memprotes kewajiban vaksinasi. Penentangan ini mungkin karena teori konspirasi vaksin, adanya kekhawatiran tentang efek samping vaksin, ketidakpercayaan kepada pemerintah, dan ketidakpercayaan kepada petugas kesehatan. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin Covid-19 sangat penting karena banyak ahli memperkirakan bahwa tingkat vaksinasi antara 70% dan 80% diperlukan untuk herd immunity atau kekebalan kelompok (Li et al., 2021). Mempertimbangkan hal tersebut maka penting untuk menciptakan pemahaman intelektual tentang penggunaan vaksin Covid-19 dan faktor awal perilaku petugas kesehatan sangat penting untuk merancang komunikasi kesehatan yang berkelanjutan guna mendorong penerimaan dan intervensi yang bermanfaat dari Covid-19 vaksinasi (Heyne et al., 2022).

Kasus covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan yang cukup banyak menjadi alasan mengapa vaksinasi covid-19 itu penting untuk dilaksanakan. Vaksinasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Selatan dalam menangani pandemi covid-19. Perkembangan pandemi covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan masih mengawatirkan. Data pantauan covid-19 di provinsi Sulawesi Selatan per tanggal 23 Juni 2022 tercatat yang positif terinfeksi COVID-19 di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 143.338. Kasus meninggal yang disebabkan virus corona sebanyak 2.464 orang, dan 247 yang dikonfirmasi positif aktif (masih dirawat), serta 140.627 orang dinyatakan sembuh. Data pantauan covid-19 di provinsi Sulawesi Selatan secara rinci di tampilkan pada gambar di bawah.

Gambar: 1. Data Pantauan Kasus Covid-19 di Sulawesi Selatan

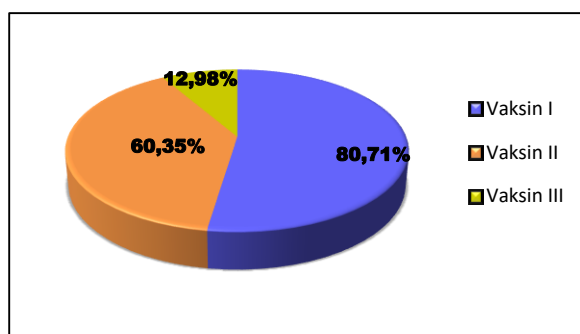
Suspek Follow Up	Probable Follow Up		Konfirmasi Aktif	
1021	15		247	
Discarded	Sembuh	Meninggal	Asimtomatik	Simptomatik
			156	91
10.318 (91,0%)	0 (0.0%)	222 (93,7%)	Sembuh	Meninggal
			140.627 (98.1%)	2.464 (1.7%)
TOTAL SUSPEK	TOTAL PROBABLE		TOTAL KONFIRMASI	
11.339	237		143.338	

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Selain kasus covid-19 yang masih mengkhawatirkan, cakupan vaksinasi covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan juga sepenuhnya belum memenuhi target yang telah di tentukan. Target persentase pencapaian yang harus dicapai untuk memasuki fase endemi dari fase pandemi adalah 70% untuk dosis pertama dan dosis kedua dan minimal 30% secara keseluruhan untuk dosis ketiga.

Gambar 2. Persentase capaian vaksinasi covid-19 di Sulawesi Selatan



Gambar di atas menunjukkan capaian vaksinasi covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan pertanggal 27 Agustus 2022. Capaian untuk vaksinasi dosis pertama sebesar 80,71%. Capaian vaksinasi dosis kedua sebesar 60,35% sedangkan untuk vaksinasi dosis ketiga sebesar 12,98%. Data tersebut menunjukkan bahwa untuk vaksin dosis pertama telah memenuhi target vaksinasi provinsi yang sebelumnya telah ditetapkan yaitu sebesar 70%. Sedangkan untuk vaksinasi dosis kedua masih belum memenuhi target karena capaiannya masih 60,35%, begitu juga dengan vaksinasi dosis ketiga yang masih sangat jauh dari target yang telah di tentukan.

Melihat kasus covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan yang masih mengkhawatirkan dengan capaian vaksinasi yang juga belum sepenuhnya memenuhi target di provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut menggambarkan bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan masih banyak masyarakat yang belum menerima vaksin secara lengkap, utamanya pada dosis kedua dan juga dosis ketiga yang mana jika dilihat capaian vaksinasinya masih rendah dari target. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kendala atau faktor yang menjadi penghambat, sehingga pemberian vaksinasi di Provinsi Sulawesi Selatan masih belum dapat tersalurkan dengan baik kepada seluruh masyarakat. Maka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan, proses implementasi kebijakannya perlu untuk dikaji. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskripsi kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui wawancara dan observasi sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi pustaka atau literature review yang berasal dari buku, jurnal, artikel, berita dan lain sebagainya. Serta dokumentasi terkait implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling. Kemudian dianalisis secara trigulasi dengan meninjau semua data tentang implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksi@governance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan setiap keputusan yang dikeluarkan oleh suatu pemerintahan yang dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa atau bernegara. Segala bentuk kebijakan publik harus dilaksanakan dengan baik untuk mencapai tujuan kebijakan, untuk memaksimalkan kebijakan, sangat diperlukan kajian implementasi kebijakan (Siltonga, 2017). Umumnya, suatu kebijakan ditetapkan kemudian diimplementasikan. Serangkaian aktifitas yang dilakukan dalam rangka menghantarkan kebijakan publik yang telah ditetapkan merupakan kegiatan implementasi, sehingga kebijakan publik yang telah ditetapkan sebelumnya dapat membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. (Agindawati, 2019).

Menurut Thomas R Dye yang dikutip dari (Nonci, 2017). *“public policy is whatever governments choose to do or not to do”* yang artinya kebijakan publik yaitu “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan”. Pemerintah harus membuat pilihan berupa tindakan yang diambil untuk dilakukan atau tidak dilakukan dalam upaya mencapai tujuan negara. Implementasi biasanya dilakukan setelah merumuskan kebijakan dengan tujuan yang jelas. Implementasi terdiri dari serangkaian kegiatan untuk memberikan kebijakan atau atauran kepada masyarakat agar kebijakan tersebut dapat membuahkan hasil yang diharapkan. Pembuatan sejumlah peraturan lain yang merupakan interpretasi dari kebijakan merupakan rangkaian kegiatan implementasi. Misalnya, undang-undang tersebut telah menghasilkan serangkaian peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah yang mengatur sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab untuk pengimplementasian kebijakan tersebut serta bagaimana kebijakan itu akan dihantarkan secara langsung kepada masyarakat (Pramono, 2020).

Implementasi kebijakan yang sebenarnya bukan hanya tentang perilaku dari badan administratif yang memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan mengarah pada kepatuhan kelompok sasaran, tetapi perilaku politik yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku pemangku kepentingan, menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang pada akhirnya memberikan dampak atau pengaruh, baik dampak yang diharapkan ataupun dampak yang tidak diharapkan (Subianto, 2020). Meter dan Horn (Samiri, 2019) mengemukakan beberapa variabel berpengaruh terhadap kinerja implementasi yakni : Standar dan sasaran kebijakan, Sumberdaya, Hubungan antar organisasi, Karakteristik agen pelaksana, Kondisi ekonomi, sosial dan politik, serta Kecenderungan (dispositition) pelaksana.

Menurut Edwards III dalam (Anggara, 2018), implementasi diartikan sebagai tahapan proses kebijakan antara tahap perumusan kebijakan dan hasil atau outcome (output, outcome) dari kebijakan tersebut. Menurutnya, kegiatan pelaksanaan terdiri dari perencanaan, pendana, pengorganisasian, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, negosiasi, dan lainnya. Model yang dikembangkannya mencantumkan empat faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Semua variabel tersebut saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan.

Kebijakan Vaksinasi

Vaksinasi adalah proses di mana seseorang memperoleh kekebalan atau dilindungi dari penyakit sedemikian rupa sehingga bahkan jika suatu hari terpapar, itu akan membuat mereka tidak sakit, atau mereka hanya akan sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin. Vaksin merupakan suatu proses dalam tubuh yang yang melindungi dari virus. Vaksinasi bertujuan tidak hanya untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah, tetapi dalam jangka panjang untuk menghilangkan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

atau bahkan memberantas penyakit itu sendiri.

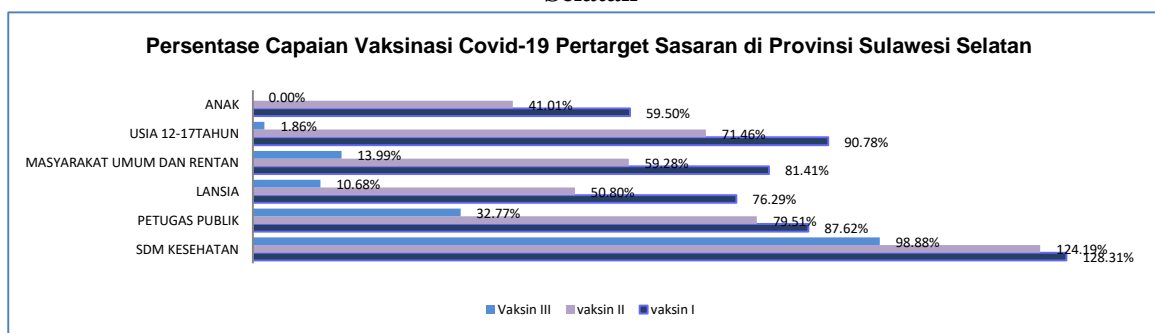
Vaksinasi berarti usaha untuk memberikan vaksin kepada sampel yang dapat merangsang pembentukan sistem kekebalan dalam tubuh, dan ketika vaksinasi diproduksi secara massal di suatu wilayah, maka herd immunity atau kekebalan kelompok dapat terjadi (Rahman, 2021). Vaksin adalah obat penawar yang diberikan untuk mencegah penyakit. Vaksin disimpan dalam tubuh dan membentuk antibodi. Antibodi memiliki kemampuan untuk mencegah penyakit, sehingga tubuh segera siap melawan penyakit. Pemberian vaksin bertujuan untuk memberikan kekebalan kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terinfeksi virus atau penyakit. Vaksin sekarang menjadi alat baru yang berperan penting dalam memerangi Covid-19 di era pandemi saat ini, dan sangat menggembirakan melihat begitu banyak vaksin yang berhasil dan dikembangkan lebih lanjut. (Asyafin et al., 2021).

Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dengan tujuan agar kasus penulaaran Covid-19 dapat diturunkan, menghindari dan menjaga masyarakat agar tetap sehat, angka kematian dan kesakitan akibat virus corona dapat dikurangi, tercapainya herd immunity, meningkatkan sistem kesehatan secara menyeluruh, serta dampak ekonomi dan sosial dapat dijaga dan diminimalisir. Pemerintah telah membagi penerima vaksin COVID-19 menjadi enam kelompok sasaran. Sasaran pertama yaitu tenaga medis, Polisi atau TNI, aparat hukum serta petugas pelayanan publik; sasaran kedua yaitu tokoh spiritual atau tokoh masyarakat dan perangkat daerah; sasaran ketiga yaitu semua tenaga atau tokoh pendidik; sasaran keempat yaitu pejabat pemerintah pusat, daerah dan legislatif; sasaran kelima yaitu penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan; dan Target keenam adalah orang-orang berusia antara 19 dan 59 tahun.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Terkait Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pasal 13A ayat (2) disebutkan bahwa semua orang yang ditetapkan memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi Covid-19.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Vaksinasi terkait Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan inisiatif Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara nasional. Program vaksinasi untuk mempercepat kegiatan vaksinasi agar tetap sadar akan perlunya vaksinasi terhadap Covid-19 di Indonesia dan untuk mencapai herd immunity. Berdasarkan keputusan menteri tersebut, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah pusat melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta badan hukum/perusahaan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Tabel 1. Persentase Capaian Vaksinasi Covid-19 Pertarget Sasaran di Provinsi Sulawesi Selatan



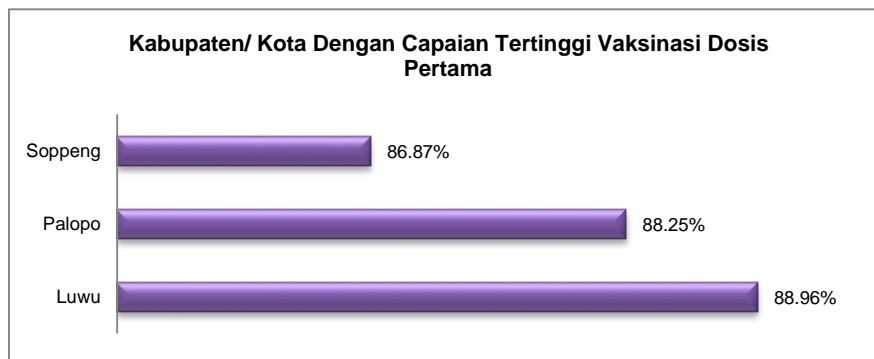
Sumber: <https://dashboardcovid19.kemkes.go.id/>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

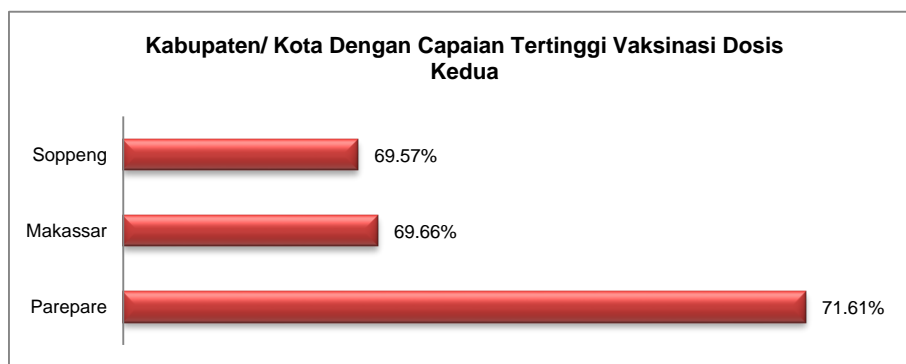
Tabel diatas merupakan klasifikasi capaian vaksinasi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan sasaran vaksinasi per tanggal 27 Agustus 2022. Data di atas menunjukkan persentase capaian vaksinasi tertinggi oleh SDM kesehatan dengan jumlah vaksinasi untuk dosis pertama 128,31%, vaksin dosis kedua sebesar 124,19% dan vaksin dosis ketiga sebesar 98,88%. Diurutan kedua ada petugas publik dengan capaian vaksin untuk dosis pertama sebesar 87,62%, vaksin dosis kedua sebesar 79,51% dan vaksin dosis ketiga sebesar 32,77%. Di posisi ketiga adan anak usia 12-17 tahun dengan capaian vaksin untuk dosis pertama sebesar 90,78%, vaksin dosis kedua sebesar 71,46% dan vaksin dosis ketiga sebesar 1,86%. Selanjutnya masyarakat umum dengan capaian vaksin untuk dosis pertama sebesar 81,41%, vaksin dosis kedua sebesar 59,28% dan vaksin dosis ketiga sebesar 13,99%. Target sasaran Lansia dengan capaian vaksin untuk dosis pertama sebesar 76,29%, vaksin dosis kedua sebesar 50,80% dan vaksin dosis ketiga sebesar 10,68%. Sedangkan capaian vaksin terendah yaitu anak-anak dengan capaian vaksin untuk dosis pertama sebesar 59,50%, vaksin dosis kedua sebesar 41,01% dan vaksin dosis ketiga sebesar 0,00%.

Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari dua puluh empat kabupaten/kota, berikut adalah tiga kabupaten/kota dengan capaian capaian vaksinasi tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan untuk vaksinasi dosis pertama, kedua dan ketiga.



Sumber: <https://dashboardcovid19.kemkes.go.id/>

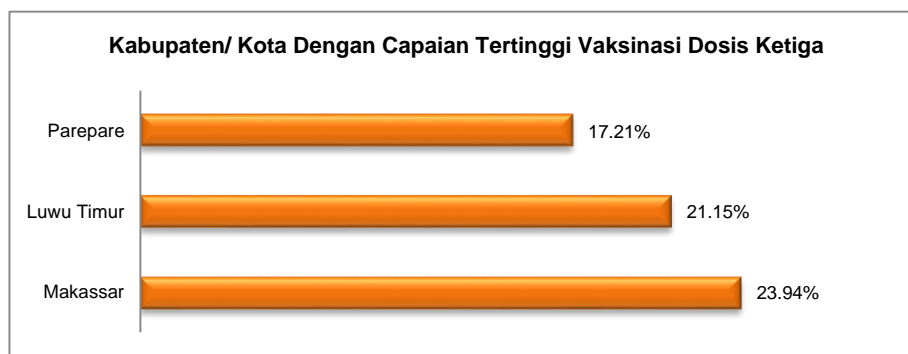
Kabupaten/kota dengan tingkat persentase tertinggi untuk vaksin dosis pertama adalah kabupaten Luwu dengan 88,86%, diikuti dengan palopo sebesar 88,25% dan Soppeng sebesar 86,87% capaian vaksinasi dari target provinsi. Capaian vaksinasi untuk dosis pertama dari dua puluh empat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi target, dimana target untuk vaksinasi dosis pertama sebesar 70%.



Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Capaian vaksinasi dosis kedua untuk tiga teratas yaitu Parepare dengan capaian vaksinasi sebesar 71,61%, disusul Makassar sebesar 69,66% dan Soppeng 69,57%. Capaian vaksinasi untuk dosis kedua dari dua puluh empat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan hanya Parepare yang telah memenuhi target, dimana target untuk vaksinasi dosis kedua sebesar 70%.



Sumber: <https://dashboardcovid19.kemkes.go.id/>

Berbeda dengan capaian vaksinasi dosis pertama dan kedua, capaian vaksinasi dosis ketiga masih sangat rendah dapat dilihat dari capaian vaksinasi tertinggi untuk dosis ketiga yaitu Makassar yang capaian vaksinasinya hanya sebesar 23,94%, disusul Luwu Timur sebesar 21,15% dan Parepare sebesar 17,21%. Capaian untuk vaksin dosis ketiga dari dua puluh empat kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan masih sangat rendah untuk dapat memenuhi target provinsi, dimana target untuk vaksinasi dosis ketiga sebesar 30%.

Data diatas menunjukkan jika capaian vaksinasi dari kedua puluh empat kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan untuk vaksin dosis pertama pelaksanaannya sudah cukup optimal, dilihat dari persentase capaian vaksinnnya yang sudah memenuhi target. berbeda dengan vaksinasi dosis dua yang capaian vaksinasinya dari dua puluh empat kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan hanya ada satu kabupaten/kota yang memenuhi target yaitu kota Parepare. Sedangkan untuk vaskinasi dosis ketiga, tidak ada satupun dari kedua puluh empat kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan yang memenuhi target sehingga dapat di simpulkan jika pelaksanaan vaksinasi dosis kedua dan ketiga masih belum optimal.

Jika dilihat dari capaian vaksinasi Provinsi Sulawesi Selatan sudah memenuhi target untuk untuk vaksinasi dosis pertama, dimana semua kabupaten/kota yang ada di Sulsel sudah melampaui target 70 %. Namun untuk vaksinasi dosis kedua, belum ada satu pun kabupaten/kota yang ada di Sulsel yang berhasil melampaui target 70%. Sama halnya dengan capaian vaksinasi dosis ketiga yang mana semua kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan belum memenuhi target yang ditentukan yaitu 30%.

Pemerintah Sulawesi Selatan dalam implementasi kebijakan vaksinasi ini memiliki target tersendiri yang hendak dicapai. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh kepala Dinkes Sulsel bahwa untuk dosis 1 kita targetkan 95%. Kemudian dosis 2 kita target 90% dan booster ditarget 50%. Jika dilihat dari target yang hendak di capai oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maka capaian vaksinasi saat ini di Provinsi Sulawesi Selatan untuk vaksinasi pertama, kedua dan ketiga masih belum bisa memenuhi target yang diharapkan.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari empat indikator yang diungkapkan oleh Edward III. Empat indikator yang dimaksud adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redactiongovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi tentang kebijakan publik dikomunikasikan kepada para pelaksana kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan apa yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pelaksana kebijakan vaksinasi dalam proses petransformasian informasi terkait vaksinasi tersebut mengambil langkah awal dengan memberikan vaksinasi terlebih dahulu kepada petugas kesehatan dan juga petugas publik sebagai contoh kepada masyarakat bahwa vaksinasi tersebut tidak memberikan dampak yang negatif bagi tubuh. Sehingga masyarakat juga turut ikut aktif dalam percepatan vaksinasi.

Upaya pemerintah Sulawesi Selatan dan proses penyaluran informasi mengenai vaksinasi covid-19 tersebut dilakukan dengan mengadakan sosialisasi baik secara langsung maupun dengan menggunakan sosial media. Proses sosialisasi dilakukan dengan kerjasama lintas sektor dengan melibatkan dinas kesehatan, pihak sekolah, polri, TNI, kepala daerah, tokoh-tokoh masyarakat dan juga pihak puskesmas untuk nantinya mengomunikasikan kepada masyarakat terkait kebijakan vaksin ini.

Kejelasan informasi terkait vaksinasi covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan masih dipengaruhi oleh banyaknya hoaks yang beredar. Banyaknya informasi yang tidak benar terkait vaksinasi covid-19 yang beredar menyebabkan banyak kekeliruan dikalangan masyarakat, dimana mereka menganggap bahwa vaksinasi tersebut berbaya bagi kesehatan. Meski demikian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih terus berusaha memberikan kejelasan informasi dengan menggunakan berbagai pendekatan untuk menyampaikan edukasi terkait manfaat vaksiansi agar kebijakan vaksinasi covid-19 ini dapat diterima secara jelas oleh mayarakat.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Selatan dalam penyampaian informasi secara jelas juga dilakukan dengan terus melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terkait Vaksinasi Covid-19 baik secara berkelompok/komunitas, maupun per individu, dengan menggunakan media Radio, TV, Sosmed, Sosialisasi Mobile, Brosus dan Vlog dengan menyebar informasi yang jelas terkait pelaksanaan vaksinasi tersebut untuk mengurangi keraguan masyarakat.

Komunikasi dalam proses pelaksanaan kebijakan vaksinasi covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik. hal tersebut dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Selatan dalam menyampaikan informasi terkait vaksinasi Covid-19. Meski dalam proses penyampaian informasi terkait vaksinasi ini sudah dilakukan dengan baik dan jelas, namun yang menjadi masalah adalah banyaknya berita tidak benar atau hoaks yang beredar dimasyarakat sehingga terjadi kekeliruan dan kesalahan pemahaman terkait vaksinasi covid-19 tersebut.

2. Sumber Daya

Sumber daya memainkan peran penting dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan, tidak peduli seberapa jelas dan konsisten ketentuan dan aturan kebijakan, pelaksanaan kebijakan bisa gagal jika orang yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia, sumber daya anggaran dan juga sumber daya peralatan.

Jumlah tenaga vaksinasi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan sudah memadai. Sehingga ketersediaan tenaga vaksinasi bukan lagi menjadi masalah dalam proses implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 daerah Sulawesi Selatan. Pemerintah juga telah memfasilitasi sarana vaksinasi covid-19 di puskesmas, rumah sakit dan juga vaksinasi serentak yang dilakukan di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Pelaksanaan vaksinasi di Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan secara gratis yang mana anggaran untuk pelakasnaan vaksinasi tersebut diambil dari Belanja Tidak Terduga (BTT) pada

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

APBD Tahun 2021.

Beberapa masalah terkait sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi covid-19 di Sulawesi Selatan yaitu ketersediaan stok vaksin yang belum merata di beberapa wilayah. Selain itu ada pula stok vaksin yang kadaluarsa dikarenakan sasaran vaksinasi yang menurun. Masalah selanjutnya adalah penyaluran insentif untuk tenaga vaksinasi yang belum tersalurkan secara merata dalam hal ini masih ada petugas vaksinasi yang gajinya belum dibayarkan.

3. Disposisi

Disposisi adalah kemauan, keinginan, dan kecenderungan pelaku program untuk menjalankan program dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kecenderungan pelaksana suatu kebijakan atau program merupakan konsekuensi penting dari implementasi kebijakan, sehingga pelaksana tidak hanya harus tahu apa yang sedang dilakukan, tetapi juga mampu mengimplementasikannya.

Salah satu kesungguhan dalam pelaksanaan peningkatan cakupan vaksinasi di Sulawesi Selatan yaitu adanya inovasi layanan vaksinasi, misalnya dengan pelaksanaan vaksinasi secara door to door dan sosialisasi ke masyarakat yang masih ragu-ragu untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Upaya peningkatan cakupan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Selatan bukan hanya layanan door to door, untuk menyukksesakan vaksinasi di harapkan para vasilisator dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat. Salah satu inovasi yang juga dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Selatan yaitu penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 yang inklusif bersama sejumlah organisasi penyandang disabilitas. Untuk menggelar vaksinasi inklusif ini Dinas Kesehatan Sulsel didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP) serta berbagai pihak lainnya yang terlibat dalam vaksinasi inklusif di lima kabupaten di Sulawesi Selatan untuk menemukan pola yang tepat bagi disabilitas, memberikan rasa aman dan nyaman. Sikap para pelaksana kebijakan vaksiansi Covid-19 di Sulawesi Selatan dapat dikatan sudah baik dan sangat mendukung penyukseskan vaksinasi tersebut dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan untuk peningkatan capaian vaksinasi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi memiliki dua aspek yaitu Standars Operasional Prosedure (SOP) dan fragmentasi/penyebaran tanggungjawab. Aspek struktural yang paling mendasar adalah standar operasional prosedur (SOP). SOP ini digunakan untuk memungkinkan pelaksanaan mengatur dan menstandarisasi tindakan yang terkait dengan pelaksanaan program tersebut. Standar operasional procedure atau SOP Pelaksanaan kebijakan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Kepmenkes tersebut mengatur Tim yang melakukan kegiatan vaksinasi Covid-19 memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pendaftaran dan verifikasi
2. Skrining (riwayat kesehatan), pemeriksaan fisik singkat dan edukasi.
3. Persiapan dan pemberian vaksin Covid-19
4. Observasi vaksinasi pasca Covid-19 dan kartu vaksinasi Covid-19;
5. Mengumpulkan dan memasukkan data hasil vaksinasi Covid-19;
6. Pembuangan limbah medis; atau
7. Menyelenggarakan kelancaran operasional pelayanan vaksinasi Covid-19.

Satu vaksinator seperti perawat, bidan dan dokter diperkirakan mampu melayani hingga 70 sasaran per hari. Ketersediaan staf eksekutif dicatat sebagai pertimbangan saat membuat jadwal layanan vaksinasi.

Berikut merupakan alur pelayanan vaksinasi Covid-19 di Sulawesi Selatan:

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

1. Calon penerima vaksin Covid-19 telah melakukan pendaftaran ulang dan tiba tepat waktu.
2. Calon penerima vaksin Covid-19 harus menunjukkan e-tiket dan bukti identitas lainnya setelah verifikasi identitas untuk memungkinkan penerima vaksin untuk lanjut melakukan skrining (pemeriksaan riwayat kesehatan)
3. Petugas kesehatan akan mengambil riwayat medis dan melakukan pemeriksaan fisik sederhana untuk memeriksa kesehatan Anda dan mengidentifikasi penyakit penyerta, setelah calon penerima vaksin dinyatakan sehat, maka proses vaksinasi dapat dilakukan.
4. Calon penerima vaksin diberikan dengan aman vaksin Covid-19.
5. Petugas akan mencatat hasil pelayanan vaksinasi, di mana orang yang divaksinasi akan diobservasi selama 30 menit untuk memantau kemungkinan KIPI, dan orang yang divaksinasi akan menerima catatan vaksinasi.

Alur pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan di Sulawesi Selatan juga sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pemberian Vaksinasi Covid-19.

Setelah Standars Operasional Prosedure (SOP) selanjutnya adalah fragmentasi. Fragmentasi yang dimaksud adalah penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Penyebaran tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu dengan bekerjasama dengan berbagai pihak mulai dari Pemangku kebijakan setempat, mengkoordinasikan organisasi antar program dan lintas sektor, termasuk organisasi profesi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, dan seluruh komponen masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan vaksinasi Covid-19.

KESIMPULAN

Capaian cakupan vaksinasi di Provinsi Sulawesi Selatan untuk vaksin dosis pertama sudah memenuhi target dengan capaian sebesar sebesar 80,71% sedangkan untuk vaksinasi dosis kedua belum memenuhi target dengan Capaian sebesar 60,35%. Begitu juga dengan vaksinasi dosis ketiga yang masih jauh di bawah target dengan capaian sebesar 12,98%. Implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari teori implementasi kebijakan Edward III menunjukkan bahwa komunikasi dari segi konsistensi belum efektif dikarenakan masih banyak informasi tidak benar yang beredar dimasyarakat terkait vaksinasi, sumberdaya dari aspek sumberdaya peralatan masih belum optimal dapat dilihat dari kekurangan stok vaksin di beberapa daerah selain itu sumber daya anggaran juga masih belum optimal dilihat dari insentif petugas vaksinasi yang belum tersalurkan secara merata. Sedangkan struktur birokrasi dan disposisi sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari pelaksanaan vaksinasi di Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan SOP yang ada serta telah dilakukan fragmentasi atau kerjasama dengan berbagai pihak, begitu juga dengan sikap pelaksana yang dianggap sudah baik dalam upaya menyukseskan kebijakan vokasiansi tersebut.

REFERENSI

- Agindawati, I. N. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan. *Jurnal Inspirasi*, 10(1), 98–105. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v10i1.68>
- Akbar, M., Virdani, D., Kasih, K. D., & Arif, L. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Surabaya. *Journal Publicuho*, 4(2), 501–510. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18061>
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Bansung: Pustaka Setia.
- Asyafin, M. A., Virdani, D., Kasih, K. D., & Arif, L. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Surabaya. *Journal Publicuho*, 4(2). <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18061>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

- Duan, Y., Shi, J., Wang, Z., Zhou, S., Jin, Y., & Zheng, Z.-J. (2021). Disparities in COVID-19 Vaccination among Low-, Middle-, and High-Income Countries: The Mediating Role of Vaccination Policy. *Vaccines*, 9(8), 905. <https://doi.org/10.3390/vaccines9080905>
- Heyne, S., Esser, P., Werner, A., Lehmann-Laue, A., & Mehnert-Theuerkauf, A. (2022). Attitudes toward a COVID-19 vaccine and vaccination status in cancer patients: a cross-sectional survey. *Journal of Cancer Research and Clinical Oncology*, 148(6), 1363–1374. <https://doi.org/10.1007/s00432-022-03961-y>
- Huang, Z., & Feng, Z. (2021). Public Health and Private Life Under COVID-19 Vaccination Policies in China: A Legal Analysis. *Risk Management and Healthcare Policy*, Volume 14, 4627–4638. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S336434>
- Li, Y., Li, M., Rice, M., Su, Y., & Yang, C. (2021). Phased Implementation of COVID-19 Vaccination: Rapid Assessment of Policy Adoption, Reach and Effectiveness to Protect the Most Vulnerable in the US. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(14), 7665. <https://doi.org/10.3390/ijerph18147665>
- Nonci, N. (2017). Implementasi Program Gernas Kakao (Studi Kebijakan Program Gernas Kakao di Kabupaten Luwu). Makassar: SAH Media.
- Piraveenan, M., Sawleshwarkar, S.(2021). Optimal governance and implementation of vaccination programmes to contain the COVID-19 pandemic. *Royal Society* <https://doi.org/10.1098/rsos.210429>
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: Unisri Press.
- Rahman, Y. A. (2021). Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law). *Khazanah Hukum*, 3(2), 80–86. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11520>
- Samiri, M. (2019). Analisis Jaringan dalam Implementasi Kebijakan Teori dan Praktek. In *Academia*. Mujahid Press.
- Siltonga, R. F. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengetasan Kemiskinan Masyarakat. Universitas Negeri Semarang.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan Implementasi dan Evaluasi. Surabaya: Brilliant.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id